

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan diberikan hak dan wewenang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh setiap daerah sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai landasan diberlakukannya otonomi daerah. Setiap daerah harus memiliki sifat kemandirian untuk dapat mengelola daerahnya dan melaksanakan wewenang otonomi daerah. Kemandirian setiap daerah harus diimbangi pula dengan pemerintahan yang baik agar mampu mengelola daerahnya secara bijak. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu diadakan penataan lingkungan pemerintahan dan sistem akuntansi pemerintahan yang baik.

Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dengan cara pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan sebagai upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Dalam era globalisasi sekarang ini pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya yaitu dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki kualitas baik dan dapat dijadikan

pedoman bagi setiap pengambilan keputusan. Laporan keuangan daerah merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah berupa sebuah laporan keuangan yang disusun dengan rapi dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik adalah memberikan informasi tentang kinerja pemerintah daerah kepada stakeholders (stakeholders) melalui penyajian laporan keuangan (Yulisa, Vince, and Taufeni, 2016). Laporan keuangan pemerintah daerah juga merupakan sebuah cerminan dan tolak ukur untuk mengetahui apakah sebuah pemerintahan telah berhasil menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Untuk itu pemerintah diharuskan dapat menghasilkan dan menyampaikan LKPD yang baik dan berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Dalam Agama Islam, telah dijelaskan oleh Allah SWT yang tercantum dalam surah Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ إِهْمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ بَ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus terdapat data dan bukti yang dicatat dan dilakukan sesuai dengan standar pencatatan yang telah ditentukan untuk dapat mempertanggungjawabkannya pada waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan ketentuan pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan kepada publik atas pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan yang baik yaitu laporan keuangan yang dibuat dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar akuntansi pemerintah digunakan sebagai prinsip dalam membuat, menyusun, dan menyajikan sebuah laporan keuangan pemerintahan agar mendapatkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pengelolaan keuangannya menerapkan SAP dengan benar dan memiliki pemahaman mengenai standar akuntansi yang baik, maka akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

Laporan keuangan yang baik dan berkualitas adalah laporan keuangan yang dalam memberikan informasi memiliki karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Karakteristik kualitatif yang harus dimiliki laporan keuangan yang berkualitas telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Relevan berarti bahwa laporan keuangan harus memuat

informasi yang dapat memberi pengaruh dalam hal membuat keputusan. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap dalam penyajian laporan keuangan.

Andal memiliki arti bahwa laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang dapat menyesatkan, penyajian informasi yang jujur, informasi yang disajikan dapat diverifikasi, dan bersifat netral. Dapat dibandingkan memiliki maksud bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih bagus jika dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat digunakan dalam melakukan penilaian terhadap kinerja. Dapat dipahami memiliki pengertian bahwa informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan harus dapat dimengerti dan dipahami secara mudah oleh para penggunanya.

Selanjutnya faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi yaitu keterlibatan dan kesetiaan seorang pegawai dalam usaha mencapai tujuan organisasi dan tetap selalu dalam organisasi. Komitmen organisasi menunjukkan seberapa loyalitas pegawai yang aktif dalam organisasi dan berusaha membangun organisasi tersebut dengan nilai yang positif.

Peran audit internal juga merupakan faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD. Audit internal melaksanakan fungsi pengawasan internal dalam pemerintahan yang memiliki tugas mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi dan setiap tugas

yang dibebankan. Pengawasan internal yang dilakukan oleh audit internal tersebut dengan melakukan audit, rivi, pemantauan, evaluasi yang berhubungan secara langsung dengan penjaminan kualitas (PP No 60 Tahun 2008).

Faktor selanjutnya adalah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam pemerintahan daerah. Kompetensi SDM merupakan individu yang mampu menjalankan dan melaksanakan pekerjaan yang ditekuninya dengan baik. Menurut Utama (2017), hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan daerah yaitu dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kinerja yang ditekuninya, kompetensi SDM dapat mempengaruhi seberapa baik kualitas dari laporan keuangan daerah. Jika SDM yang melaksanakan sistem akuntansi memiliki kompetensi di bidang akuntansi, maka sumber daya tersebut akan menggunakan pengetahuan dan pemahamannya dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan menetapkan aturan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Palimbong, R., Yohanis, and Tawakkal, 2018). Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem informasi akuntansi keuangan yang belum diterapkan, atau kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam penyusunan laporan keuangan, atau peran audit internal yang masih lemah. (Setyowati dan Wikan, 2014)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk

laporan keuangan tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan predikat WTP yang merupakan strata tertinggi dalam opini pemeriksaan untuk yang ke tujuh kalinya. Opini WTP yang diraih tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditekankan agar Pemerintah Kabupaten Bantul dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, ekonomis, tertib, dan akuntabel dimasa yang akan datang. (<https://bkad.bantulkab.go.id>)

Badan Pemeriksa Keuangan telah memberikan opini WTP terhadap Kabupaten Bantul, namun BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan keuangan, yaitu: (1) Penyelesaian piutang yang berpotensi tidak tertagih belum memadai; (2) Pengelolaan persediaan belum memadai; (3) Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Bantul belum tertib; (4) Belanja barang jasa berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat dianggarkan pada belanja pegawai senilai Rp219.900.000,00; (5) Tidak terdapat mekanisme pelaporan dan pengesahan atas penerimaan dana bantuan non APBD yang langsung diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (<https://bkad.bantulkab.go.id>)

Badan Pemeriksa Keuangan juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Rencana pengadaan belum seluruhnya di input dalam SiRUP; (2) Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 84.970.492,94 atas pekerjaan pembangunan gedung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas

Kesehatan; (3) Kekurangan volume atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp 271.350.166,46. (<https://bkad.bantulkab.go.id>)

Penelitian mengenai pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dilakukan oleh Thenikusuma dan Nathasya (2019) yang mendapatkan hasil bahwa SAKD, fasilitas infrastruktur, dan kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahlida, Rindu, dan Pigo (2017) juga mendapatkan hasil bahwa SAKD memiliki pengaruh terhadap kualitas dari laporan keuangan daerah. Menurut Lasmara dan Sri (2016) peran audit internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan yang berkualitas. Pada penelitian Setyowati dan Wikan (2014) mendapatkan hasil bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selanjutnya penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kalumata, Ventje, dan Jessy (2016), mendapatkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada kualitas dari sebuah laporan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirwana dan Haliah (2018) yang mendapatkan hasil bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil serupa juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Sihite dan Holiawati (2017) yang mendapatkan hasil yaitu kompetensi dari sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menambah variabel peran audit internal pada pemerintah daerah dan variabel komitmen organisasi. Sesuai dengan saran yang diberikan oleh penelitian terdahulu untuk menambahkan variabel yang memiliki potensi dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka peneliti menambahkan variabel komitmen organisasi. Penambahan variabel peran audit internal juga sesuai dengan fenomena yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu masih adanya kelemahan pada sistem pengendalian internal dalam penyusunan keuangan. Tempat penelitian yang dilakukan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika pada penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Empat Lawang, sedangkan penelitian ini memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bantul. Pada Kabupaten Bantul terdapat fenomena yaitu adanya ketidakpatuhan pegawai pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan, terdapat kelemahan terhadap sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan, pengendalian proses penyusunan anggaran yang masih kurang cermat, dan dalam pengelolaan persediaan masih belum memadai (<https://bkad.bantulkab.go.id>).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Peran Audit Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Bantul)”**.



## **B. Perumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut, maka muncul permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan penjelasan mengenai latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat di bidang teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk lebih memperkuat teori yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Komitmen Organisasi, Peran Audit Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bantul.

2. Manfaat di bidang praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang praktik yaitu dapat memberikan masukan bagi OPD Kabupaten Bantul agar dapat memberikan kualitas laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan yang berkualitas dapat memberi bantuan bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan. Kemampuan pemerintah yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan penggunanya terhadap pemerintah.